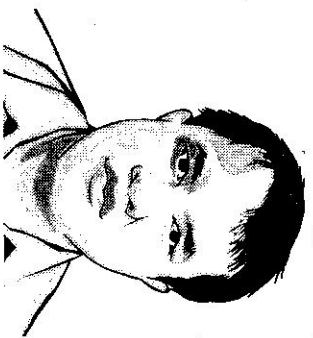


Wasbang KPK Itu Harusnya Memindak Koruptor



O l i e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK *)

Jangan Korbankan Pahlawan

Wasbang itu seharusnya bukan retorika semata. Melainkan aksi-aksi heroik dalam melindungi negara dari ragam perusakan moral dan sosial ekonomi yang dilakukan para koruptor. Jika abai atas suara publik yang menolak segala pelemahan KPK dari berbagai sisi, termasuk menyingkirkan pegawai berprestasi, negara sedang menjalankan spirit utilitarianisme. Artinya, negara yang kebanyakan disokong kekuatan politik dan kepentingan ekonomi tertentu mengorbankan pegawai KPK berprestasi demi kedok kepentingan umum atau stabilitas kekuasaan.

Moto utilitarianisme adalah: *killing one to save five*. Ini tentu spirit berbahaya bagi penegakan hukum dan keadilan. Pegawai KPK selaku pejuang keadilan terpaksa dikorbankan (karena dianggap berbahaya). Benar atau tidaknya tindakan negara bertanggung pada kepentingan kelompok besar yang memengaruhi kekuasaan. Tindakan negara utilitarian biasanya diupayakan

atau dikondisikan secara legalistik seolah telah didukung mayoritas masyarakat. Di sini rakyat yang mendukung kebijakan negara telah tehegemoni lewat isu yang memojokkan si pejuang tadi.

Dalam etika utilitarianisme, ukuran benar atau salah bukan pada kebenaran dan keadilan. Melainkan pada manfaat bagi mayoritas kepentingan (*the greatest happiness of the greatest numbers*). Empat problem fatal utilitarianisme. *Pertama*, stabilitas politik dan kepentingan umum yang dibangun negara di atas dasar yang salah akan menindas segelintir warga yang berjuang mati-matian bagi keadilan. Publik akhirnya pasrah dan menyerahkan hukumannya kepada Tuhan saja.

Kedua, utilitarianisme negara mengacaukan tatanan moral yang seharusnya melindungi dan mendukung para pejuang hukum dan keadilan. Hukum dan moral akhirnya berlaku relatif bagi negara (tergantungan manfaat). Ini berbahaya bagi asas persamaan di hadapan hukum. *Ketiga*, utilitarianisme negara jelas mengorbankan keadilan secara kejam dan ekstrem bagi kaum idealis yang sejujurnya berjuang demi keadilan sistem bernegara. Para pegawai KPK yang berprestasi dalam pemberantasan korupsi merupakan pahlawan bagi kemajuan peradaban bangsa. Jadi, sungguh ironis jika mereka malah dianggap sebagai ancaman atau pengganggu negara.

Keempat, utilitarianisme halnya menjadikan kepentingan ekonomi (materi) dan kesen-

angan bagi kelompok besar sebagai pertimbangan untuk mengorbankan para pejuang hukum dan keadilan. Akibatnya, penegakan wibawa negara dilakukan secara subjektif oleh sekelompok kekuasaan politik, bukan lagi berdasarkan integritas bernegara.

Sebagai negara bertuhan, negara seharusnya memempatkan keadilan dan perlindungan bagi warganya yang jujur serta gigiat memberantas korupsi. Stabilitas kekuasaan dan kepentingan umum harus dipertahankan dengan benar serta adil, bukan mengorbankan kaum idealis/pejuang. Selama ini masyarakat sudah menunjukkan reaksi protes atas segala upaya pelemahan KPK. Bahkan, masyarakat akan mendapuk pegawai KPK itu sebagai pahlawan inspirasi moral dalam pembangunan nasional.

Stabilitas kekuasaan tanpa kejujuran dan keadilan adalah semu dan hanya menyimpan bom waktu terjadinya reformasi ulang, bahkan revolusi. Dalam konteks negara berketuhanan, negara sungguh tidak patut mengorbankan warganya demi negara. Peradaban suatu negara dianggap maju apabila kehadiran para pejuang pemberantasan korupsi dan demokrasi dianggap sebagai pembawa manfaat mulia bagi negara. Pemimpin negara Pancasila wajib membela dan melindungi mereka. (*)

*) Dosen Hukum Bisnis di Program Manajemen Bisnis FBE UK Petra Surabaya

gawai
lu jauh
belanja
problem
tisi-an-
Selasa
goodohi
uan
ah satu
belanja

APBD
pelanja
ola pe-
untuk
dengan
entara
nenda-
modal
masya-
nanya-
pe-



ng me-
pelanja
persen
dalam
, masih
it, yang
ndagri
nk dari